

# Bahaya di balik benefit Protokol Madrid

## Bagian pendapatan terbesar konsultan HaKI akan hilang

OLEH FIROZ GAFFAR

Selken Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKH-KIK)

**Bila Anda pemilik merek lokal yang akan go internasional, ada berita gembira. Kalau tidak ada aral, tahun ini Indonesia bakal bergabung ke Protokol Madrid, sehingga pendaftaran merek di sekalgus banyak negara bakal easier, simpler, and faster.**

**M**engapa begitu? Sebab, konsepnya 'serbasatu' yaitu satu permohonan, satu bahasa, satu mata uang, satu dokumen, satu pemeriksaan, satu pengumuman untuk mengurus merek internasional. Tanda akan diratifikasinya protokol terlihat dari diadakannya RUI Merek oleh pemerintah. Selalu yang ditenggangkan, protokol ini pasti membawa kebaikan bagi pemilik merek, seperti UKM yang berorientasi ekspor, pengusaha yang memasarkan produk di mancanegara atau pengusaha merek nasional di pasar global. Masalahnya, apa benar sistem pendaftaran tunggal tersebut menjadi opsi terbaik bukan cuma buat pemilik merek, tapi untuk kita semua? Memang banyak kenikmatan formal-prosedural yang dapat dibanggakan dari Protokol Madrid. Misalnya, permohonan sederhana, masa pendaftaran di setiap negara 12 sampai 18 bulan dan masa perlindungan 10

tahun. Selain itu, permohonan tunggal untuk perpanjangan masa perlindungan, formulir tunggal untuk perubahan nama dan alamat, kemungkinan permohonan multikelas dan tidak diperlukan legalisasi dokumen (Albert Tramposch, 2003).

Buat kantor merek, kemudahan yang diberikan adalah tidak usah lagi memeriksa keberatan dengan syarat formal atau mengklasifikasikan barang/jasa dan mengumumkan merek terdaftar. Biaya pendaftaran yang diterima Biro Internasional dibagi dan ditransfer ke masing-masing kantor merek negara yang dituju.

Berapa penghematan pemilik merek di Indonesia? Bandingkan saja pendaftaran konvensional dan internasional dengan sejumlah asumsi, misalkan tiga kelas di 11 negara (termasuk Indonesia). Sepanjang 2005-2010 jumlah rata-rata pendaftaran merek adalah 40.000 per tahun. Mungkin 10% melakukan pendaftaran merek secara konvensional pada tiga kelas. Bila biaya pendaftaran Rp600.000 per kelas dan biaya konsultan asing US\$1.000 dolar per kelas, maka totalnya adalah Rp1.327,2 miliar.

Dengan kurs (dengan asumsi kurs US\$1 = Rp10.000). Dengan Protokol Madrid, langkah pertama basic registration di Indonesia dengan membayar biaya pendaftaran Rp600.000 per kelas dan biaya konsultan lokal Rp500.000.

Langkah berikutnya pendaftaran internasional dengan membayar: basic

fee (merek nonwarna) 653 Sfr, supplementary fee lebih 3 kelas adalah 100 Sfr per kelas, complimentary fee 100 Sfr, individual fee negara yang dituju (diasumsikan tidak terkena), dan biaya konsultan lokal Rp5 juta per kelas. Total biaya bagi 4.000 pendaftaran adalah Rp79,4 miliar.

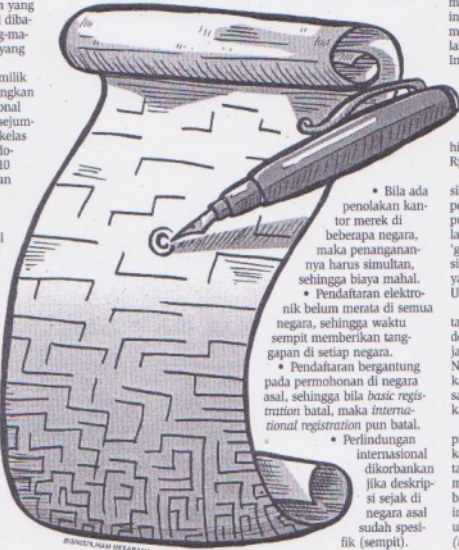
Dengan demikian, terjadi penghematan Rp1.247,8 miliar (yaitu selisih Rp1.327,2 miliar dan Rp79,4 miliar). Suatu jum-

lah yang superfantastis, kalau memang jadi kenyataan (asumsi kurs 1 Sfr = Rp8,500).

### Menyimpan bahaya

Namun, Protokol Madrid ternyata menyimpan segudang bahaya tersembunyi, kalau tidak diteliti lebih jauh. Bahaya tersebut antara lain:

- Registrasinya bukan "pendaftaran" sejati, melainkan cuma kumpulan permohonan yang baru diakui di masing-masing kantor merek negara yang dituju.



- Bila ada penolakan kantor merek di beberapa negara, maka penanganan-nya harus simultan.
- Pendaftaran elektronik belum merata di semua negara, sehingga waktu sempit memberikan tanggapan di setiap negara.
- Pendaftaran bergantung pada permohonan di negara asal, sehingga bila basic registration batal, maka international registration pun batal.
- Perlindungan internasional dikorbankan jika deskripsi sejak di negara asal sudah spesifik (sempit).

- Merek harus sama persis dengan pendaftaran awal, padahal industri butuh tampilan merek yang berevolusi.

- Centim attack, yakni serangan terpusat kompetitor dalam 5 tahun untuk membatalkan merek di negara asal, sehingga merek di semua negara lain otomatis batal.

- Pendaftaran hanya berlaku di negara anggota saja, sehingga terbatas pada jumlah 80 negara saja (Mark A Steiner, 2009).

- Buat kantor merek, pekerjaannya makin menumpuk karena korespondensi langsung harus dilakukan lebih cepat daripada biasanya. Padahal jumlah dana yang diterima dari pendaftaran internasional tidak beda dengan pendaftaran secara konvensional.

Malah, kalau jumlah permohonan internasional menurun, berakibat anjloknya pemasukan negara melalui kantor merek. Buat konsultan HaKI, bagian terbesar pendapatannya pasti menghilang, karena pendaftaran internasional tidak lagi wajib memakai jasa mereka. Bila jumlah pendaftaran merek asing di Indonesia sepanjang 2005-2010 rata-rata 4.000 per tahun dan diasumsikan biaya konsultan US\$500 per permohonan, maka pendapatan semua konsultan HaKI yang hilang setiap tahun mencapai Rp20 miliar rupiah.

Buat negara, karena penghasilan konsultan hilang, maka pendapatan negara melalui pajak pun lenyap. Dengan berkurangnya protokol ini, negara 'gagal' merapuk pajak penghasilan (PPh) sebesar US\$2 miliar yaitu 10% dari 4.000 kali US\$1.000 setiap tahunnya. Sosok Protokol Madrid ditampikan begitu simpel sebagai dewa penolong yang memanggul pemilik merek nasional. Namun, protokol ini bukan panacea, sebab ada efek samping yang baru dirasakan kalau telanjur berlaku.

Itu sebabnya, jangan kesampingkan analisis mendalam dan kehati-hatian. Terkadang yang tampak sederhana di permukaan, ternyata kompleks di bawahnya. Oleh karena itu, ingat pepatah: Jangan mengubah sesuatu tanpa perhitungan (*nili temere novandum*).